

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian bangsa. Menurut Rudianto (2012:3) terdapat tiga bidang usaha yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang produknya adalah bersifat non fisik yang dimana kegiatannya menyediakan jasa untuk pelanggan.
2. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan/konsumen.
3. Perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa:

Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan pengertian UMKM di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa UMKM merupakan salah satu usaha perekonomian bangsa yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. UMKM dibagi menjadi tiga bidang usaha seperti perusahaan jasa yaitu perusahaan yang produksinya bersifat non fisik, perusahaan dagang dimana perusahaan tersebut membeli barang dari perusahaan lain kemudian menjualnya kembali, serta perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang mengelola barang dari bahan baku menjadi barang jadi.

2.1.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mengatur kriteria usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000
- 2. Kriteria Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2015) kriteria UMKM dan Usaha Besar berdasarkan Aset dan Omset sebagai berikut:

- 1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki aset maksimal Rp 50.000.000
 - b. Memiliki omset maksimal Rp 300.000.000
- 2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki aset > Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000
 - b. Memiliki omset > Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000
- 3. Usaha Menengah
 - a. Memiliki aset > Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000
 - b. Memiliki omset > Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000
- 4. Usaha Besar
 - a. Memiliki aset > Rp 10.000.000.000
 - b. Memiliki omset > Rp 50.000.000.000

2.1.3 Asas dan Tujuan UMKM

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa atas Usaha, Mikro, dan Kecil adalah:

- 1. Kekeluargaan
- 2. Demokrasi ekonomi
- 3. Kebersamaan
- 4. Efisiensi berkeadilan
- 5. Berkelanjutan
- 6. Berwawasan lingkungan
- 7. Kemandirian
- 8. Keseimbangan kemajuan
- 9. Kesatuan ekonomi nasional

2.1.4 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah
4. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

2.2 Akuntansi

2.2.1 Pengertian Akuntansi

American Accounting Association mendefinisikan bahwa “akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan, informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* mendefinisikan bahwa “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Berdasarkan pengertian akuntansi di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang). Sehingga, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dibidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan.

2.2.2 Kegunaan Akuntansi

Menurut Effendi (2015:4) bahwa tujuan utama akuntansi adalah memberikan

informasi keuangan (kuantitatif) dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik intern maupun ekstern.

1. Bagi Pihak Intern (Manajemen)
 - a. Perencanaan, berdasarkan informasi akuntansi pemilik perusahaan atau manajemen dapat membuat rencana kegiatan atau anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.
 - b. Pengendalian, setelah rencana dan anggaran dibuat akuntans bertugas memantau apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan atau dianggarkan atau adanya penyimpangan. Jika ada penyimpangan, akuntansi akan menganalisis penyimpangan tersebut dan menyajikan informasi penyebab terjadinya penyimpangan. Manajemen akan mempertimbangkan tindakan koreksi yang diperlukan akibat adanya penyimpangan tersebut.
 - c. Pertanggungjawaban, informasi akuntansi (berupa laporan keuangan) pada akhir periode akan disampaikan oleh manajemen kepada para pengguna untuk dilakukan penilaian. Manajemen puncak melakukan penilaian kinerja manajer bawahannya (seperti manajer divisi) juga berdasarkan informasi akuntansi.

2. Bagi Pihak Ekstern

Informasi akuntansi digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. Misalnya bagi calon investor informasi akuntansi berguna untuk menilai apakah ia akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Bagi kreditur berkepentingan untuk menilai apakah suatu perusahaan layak untuk diberi pinjaman atau tidak, dan sebagai alat untuk menilai perkembangan perusahaan setelah memperoleh pinjaman.

Berdasarkan kegunaan akuntansi di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa kegunaan akuntansi dibagi menjadi dua pihak-pihak berkepentingan, baik dari intern maupun ekstern. Pihak intern merupakan pihak manajemen yang didalamnya terdapat perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Sedangkan pihak ekstern digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, contohnya bagi kreditur.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum

Di bidang akuntansi dan keuangan terutama audit di Indonesia, dikenal istilah “prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia” adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Prinsip akuntansi yang berterima umum di suatu wilayah tertentu mungkin berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku di wilayah lain.

Untuk laporan keuangan yang akan didistribusikan kepada umum di Indonesia, harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Sesuai standar pelaporan pertama dari standar auditing, auditor dalam laporannya akan mengungkapkan dalam opininya apakah laporan keuangan yang diaudit telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

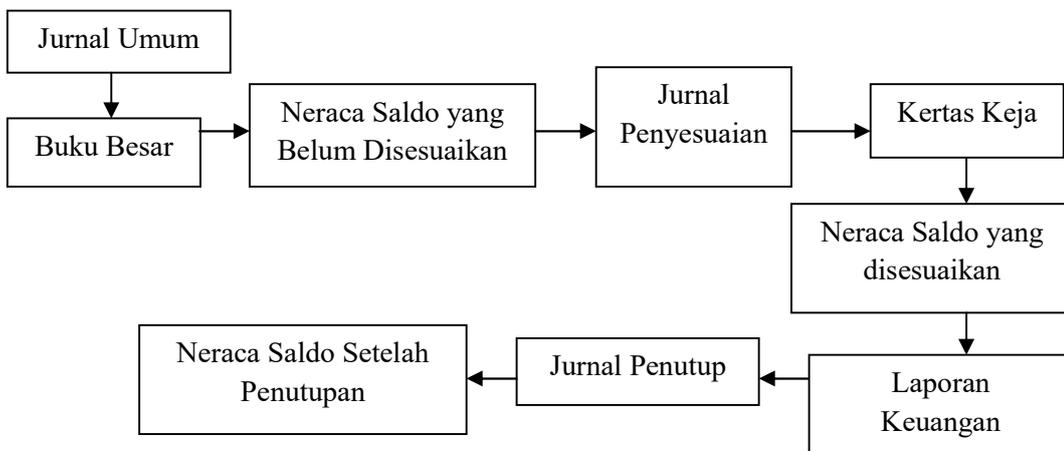
Di Indonesia, ada empat pilar prinsip akuntansi berterima umum:

1. Standar Akuntansi Keuangan Konvergensi *International Financial Reporting Standard* (SAK-IFRS)
2. SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
3. Standar Akuntansi Syariah
4. Standar Akuntansi Pemerintahan

2.2.4 Siklus Akuntansi

Menurut Effendi (2015:23) menjelaskan siklus akuntansi merupakan “proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi sejak awal periode pembukuan sampai dengan akhir periode pembukuan dan kembali lagi ke awal periode pembukuan, baik itu proses atau pengolahan data secara manual maupun komputerisasi”. Menurut Warren (2017:175) “Siklus akuntansi adalah proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan menjurnal transaksi-transaksi dan diakhiri dengan penyiapan neraca saldo setelah penutupan”.

Gambar siklus akuntansi yang dijelaskan adalah sebagai berikut:



Sumber: Warren (2017:176)

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

Menurut Warren (2017:173) langkah-langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal
2. Posting transaksi tersebut ke buku besar
3. Menyiapkan daftar saldo yang belum diselesaikan
4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian
5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode (opsional)
6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar
7. Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan
8. Menyiapkan laporan keuangan
9. Membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar
10. Menyiapkan daftar saldo setelah penutupan

Berdasarkan pengertian siklus akuntansi di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa siklus akuntansi merupakan proses pencatatan transaksi keuangan yang dimulai dengan menganalisis dan diakhiri dengan penyiapan neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi diawali dengan jurnal umum, buku besar, neraca saldo yang disesuaikan, dan terakhir neraca saldo setelah penutupan.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (2018:13) menjelaskan laporan keuangan adalah “suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Warren (2017:16) menyatakan “setelah transaksi dicatat dan dirangkum, laporan kemudian disiapkan bagi para pengguna. Laporan akuntansi yang menyediakan laporan ini disebut laporan keuangan”. Menurut Martani (2016) “Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang terjadi dalam satu entitas. Setelah, transaksi dicatat dan dirangkum, laporan kemudian disiapkan bagi para pengguna”. Menurut Farid dan Siswanto (2011:2) “Laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial”.

Berdasarkan pengertian laporan keuangan di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah alat berupa ringkasan informasi

keuangan berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu. Jenis laporan keuangan menurut PSAK No.1 (2015:3) adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2014:28) ada empat macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan yang dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passive (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Laporan ini juga menjelaskan perubahan ekuitas dan sebab-sebab terjadinya perubahan ekuitas di perusahaan.
4. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. CALK memberikan penjelasan naratif rincian jumlah yang disajikan.

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang berkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 (2016) “tujuan laporan keuangan adalah memberikan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi (PSAK 1, 2016):

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
5. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dan arus kas

Berdasarkan pengertian dari tujuan di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen. Perusahaan agar mencapai tujuan tersebut dapat dilihat dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban.

2.5 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 24 Oktober 2016. SAK EMKM mulai berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 01 Januari 2018. Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) maka standar akuntansi keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah.

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan criteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Entitas yang tidak memenuhi definisi dan criteria sebagaimana yang dimaksudkan dapat menerapkan SAK EMKM, jika otoritas

mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.5.1 Pengakuan dalam Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM

Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut (IAI, 2018:6):

1. Aset
Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaatnya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
2. Liabilitas
Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonominya dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.
3. Penghasilan
Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonominya di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
4. Beban
Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonominya di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset dan kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
5. Saling Hapus
Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK EMKM. Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangkan hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat aset tetap dan beban penjualan terkait.

2.6 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

2.6.1 Laporan Laba Rugi

Menurut IAI (2018:11) “Entitas untuk menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode”. Menurut IAI (2018) dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan

- b. Beban Keuangan
- c. Beban Pajak

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Pendapatan Usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan Lain-Lain		xxx	xxx
<i>JUMLAH PENDAPATAN</i>		xxx	xxx
BEBAN			
Beban Usaha		xxx	xxx
Beban Lain-Lain	11	xxx	xxx
<i>JUMLAH BEBAN</i>		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban Pajak Penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

2.6.2 Laporan Posisi Keuangan

Menurut IAI (2018:11) “laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada setiap akhir periode pelaporan”. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun dalam penyajiannya. Meskipun demikian, penyajian pos-pos aset entitas dapat mengurutkan berdasarkan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Menurut IAI (2018) pos-pos yang mencakup laporan posisi keuangan adalah:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Aset Tetap
- e. Utang Usaha
- f. Utang Bank
- g. Ekuitas

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8			
ASET	<u>Catatan</u>	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Kas dan setara kas		xxx	xxx
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		xxx	xxx
Piutang Usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban Dibayar di Muka	7	xxx	xxx
Aset Tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xxx)	(xxx)
<i>JUMLAH ASET</i>		xxx	xxx
LIABILITATS			
Utang Usaha		xxx	xxx
Utang Bank	8	xxx	xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS</i>		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo Laba (defisit)	9	xxx	xxx
<i>JUMLAH EKUITAS</i>		xxx	xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS&EKUITAS</i>		xxx	xxx

2.6.3 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Menurut IAI (2018:13) catatan atas laporan keuangan adalah:

Catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

**ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20X8**

1. UMUM

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UUNomor 20 tahun 2008. Entitas berdomisili di jalan xxx, Jakarta Utara.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan *overhead*. *Overhead* tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. *Overhead* variable dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan actual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hokum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20X8**

3. KAS

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx

4. GIRO

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx

5. DEPOSITO

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku bunga – Rupiah	4,50%	5,00%

6. PIUTANG USAHA

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

8. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20X8, entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rp xxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

9. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8		
10. PENDAPATAN PENJUALAN		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
11. BEBAN LAIN-LAIN		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Pajak penghasilan	xxx	xxx